

**TENDENCY OF ISSUER IN PRESENTING FINANCIAL REPORTS BASED ON THE FAIR VALUE  
AFTER THE IMPLEMENTATION OF PSAK 68**

**Nugroho Wisnu Murti dan Arief Budhi Darma**

Prodi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "AUB" Surakarta  
Jalan MR. Sartono No.97, Nusukan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah 57135  
Email: [nugroho.wm@stie-aub.ac.id](mailto:nugroho.wm@stie-aub.ac.id)

**ABSTRACT**

*This research had conducted to investigate trend of cormporate in Indonesia to implement fair value measurement from International Financial Reporting Standards (IFRS) 13 which was adopted in PSAK 68. We analysed 1.464 data observations of corporates' financial statements in two years before and after the implementation of PSAK 68 (2013 to 2016). Results showed that there was significant positive trend of fair value disclosure before implementation of PSAK 68 compared to after implementation that standard. Implementation of these standard had positive significant influence on these positive trend. This study provided information to Indonesian Institute of Accountants that fair value disclosure in Indonesia had upward trend in two years after implementation of PSAK 68. Previously, there was no significant differences in one year after the implementation of this standard. Moreover, public accountant quality was measured by public accountant affiliation showed a positive effect in this trend. This result indicated that Indonesia need quality of public accountant based on international public accountant organization to verify fair value disclosure.*

**Keyword:** *trend, fair value disclosures, PSAK 68, public accountant, IFRS 13*

**KECENDERONGAN EMITEN UNTUK MEMILIH MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN  
BERDASARKAN NILAI WAJAR SETELAH PENERAPAN PSAK 68**

**ABSTRAK**

Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kecenderungan emiten untuk lebih memilih menyajikan laporan keuangan berdasar nilai wajar atau berdasar biaya historis sejak sepenuhnya mengimplementasikan PSAK 68 yang diadopsi dari *IFRS 13*. Penelitian ini menganalisis 1.464 data panel berupa laporan keuangan emiten di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah penetapan resmi PSAK 68 (1 Januari 2015). Hasil menunjukkan bahwa kecenderungan emiten untuk menyajikan laporan keuangan berdasar nilai wajar dibanding biaya historis, naik signifikan dari dua tahun sebelum penetapan PSAK 68 dibanding setelahnya. Penetapan standar tersebut berpengaruh signifikan meningkatkan kecenderungan emiten untuk lebih memilih menyajikan nilai wajar dibandingkan biaya historis. Informasi ini penting bagi Ikatan Akuntan Indonesia karena penelitian sebelumnya pada masa satu tahun setelah penetapan standar tentang nilai wajar ini ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan trend penyajian nilai wajar oleh emiten yang diharapkan meningkat dengan adanya aturan baru tersebut. Lebih lanjut juga ditemukan bahwa kualitas audit yang diukur dari afiliasi Kantor Akuntan Publik memiliki korelasi positif meningkatkan kecenderungan emiten untuk memilih menyajikan laporan keuangan dengan nilai wajar dibanding dengan biaya historis. Hasil tersebut memberikan indikasi bahwa emiten di Indonesia masih membutuhkan akuntan publik yang memiliki afiliasi dengan akuntan publik asing yang termasuk dalam big-4 untuk melakukan verifikasi penyajian nilai wajar.

**Kata Kunci:** kecenderungan, nilai wajar, PSAK 68, KAP, IFRS 13

## PENDAHULUAN

Penelitian ini memiliki tiga tujuan antara lain 1) mengetahui tingkat kecenderungan emiten untuk lebih memilih menerapkan nilai wajar dibanding dengan biaya historis sesudah penerapan efektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 68) sebagai standar pengukuran nilai wajar yang baru di Indonesia; 2) mengetahui pengaruh kualitas Kantor Akuntan Publik terhadap kecenderungan penerapan nilai wajar; dan 3) mengetahui pengaruh penerapan standar tersebut terhadap kecenderungan untuk memilih pengungkapan nilai wajar. Urgensi tujuan penelitian ini adalah kekhawatiran terhadap kesiapan emiten di Indonesia terhadap adopsi konsep Nilai Wajar dari *International Financial Reporting Standar (IFRS) 13*. Urgensi tersebut mendasarkan pada kekhawatiran kesiapan emiten di Indonesia terhadap adopsi konsep nilai wajar dari *IFRS 13* secara penuh. Dasar pertama kekhawatiran tersebut adalah kesiapan sumberdaya manusia yang memberikan verifikasi nilai wajar yang saat ini masih mengandalkan akuntan, tapi profesi ini belum dapat dikatakan memenuhi kualifikasi memberikan opini keandalan pengungkapan nilai wajar. Hal tersebut berdasar pada pernyataan penasehat Teknis Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bahwa *IFRS 13 Fair Value Measurement* adalah salah satu standar akuntansi yang cukup rumit dan membutuhkan ilmu-ilmu penilaian yang mungkin tidak dipelajari oleh para akuntan yang mengenyam ilmu pendidikan akuntansi tradisional (Wahyuni, 2013). Dasar kedua kekhawatiran ini adalah prioritas pada Level 1 yang berat untuk dicapai, mengingat volatilitas harga pasar di Indonesia yang tinggi dibanding negara lain (Wahyuni, 2013). Selain itu dasar pertimbangan tersebut, penelitian terdahulu yang menguji kebermanfaatan konsep nilai wajar untuk laporan keuangan ini juga masih banyak menghasilkan perbedaan kesimpulan (Majercakova and Skoda, 2015).

Penelitian terdahulu tentang relevansi nilai wajar masih menunjukkan perbedaan hasil meskipun *IFRS* telah diakui bahkan diadopsi secara penuh diberbagai negara di dunia. Salah satu penelitian tersebut dilakukan pada industri real estate di United Kingdom yang menemukan bahwa pengukuran nilai wajar lebih relevan dibandingkan dengan pendekatan pengukuran nilai historis (Danbolt dan Rees, 2008). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa rata-rata laba dilaporkan berdasarkan *IFRS* lebih tinggi dibanding dengan yang dilaporkan berdasarkan standar akuntansi di United Kingdom (Ali, Akbar dan Ormrod, 2016). Pada tahun yang sama, ditemukan juga bahwa pengukuran nilai wajar dibuktikan lebih handal dibandingkan dengan penilaian berdasar biaya historis terhadap penilaian liabilitas (Laux, 2016). Penelitian lain menemukan bahwa tingkatan atau klasifikasi level pada nilai wajar menunjukkan bahwa nilai wajar pada Level 1 dibuktikan lebih relevan terhadap keputusan investor dibanding Level 2 maupun 3 (Siekkinen, 2016). Penelitian di Indonesia pada seluruh emiten pada masa satu tahun sebelum dan sesudah penerapan PSAK 68 menemukan bahwa nilai wajar lebih memiliki relevansi nilai dibandingkan dengan nilai historis yang diukur dengan *economic value added (EVA)* dan *return saham* (Murti dan Suyanto, 2017). Selain itu, ditemukan juga bahwa tidak ada beda signifikan kecenderungan emiten untuk memilih penyajian nilai wajar pada masa satu tahun sebelum dan sesudah penerapan PSAK 68 pada 1 Januari 2015 bahkan penerapan standar tersebut memiliki hubungan negatif pada terhadap *EVA* dan juga *return saham* (Murti, 2017). Dengan demikian, salah satu tujuan penelitian ini menguji dengan observasi yang lebih besar pada masa sebelum dan sesudah penetapan PSAK 68, sebagaimana yang dirumuskan pada tujuan pertama penelitian ini.

Selain pertimbangan beberapa penelitian yang menemukan relevansi nilai wajar diatas, ada juga beberapa penelitian lain yang membuktikan bahwa nilai historis lebih handal dibandingkan nilai wajar. Penelitian tersebut salah satunya memberikan kesimpulan bahwa nilai wajar atas properti investasi tidak relevan terhadap fluktuasi harga saham (Juwono dan Feliana, 2013). Penerapan nilai wajar tersebut juga memeberikan pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan yang memiliki aset biologis (Petrus dan Farahmita, 2013). Penelitian lain dengan obyek aset biologis juga memberikan kesimpulan bahwa nilai aset biologis yang diukur dengan pendekatan nilai wajar (*International Accounting Satandard 41*) memiliki potensi informasi yang menyesatkan (Beatrice, 2013). Kualitas laba agregat dengan menggunakan nilai wajar juga lebih rendah dibandingkan nilai historis (Šodan, 2015). Laba yang diukur dengan nilai wajar juga tidak relevan terhadap keputusan investasi (Beisland dan Knivsfla, 2015). Penggunaan prinsip nilai wajar memberikan efek yang tidak baik kepada industri perbangan di beberapa negara di Eropa (Bratten, Causholli dan Khan, 2016). Beberapa industri perbankan yang dimaksud tersebut perlu melakukan penyesuaian nilai atas beberapa jenis instrument keuangan yang menurun secara berlebih karena pemakaian konsep nilai wajar pada masa krisis ekonomi (Bratten, Causholli dan Khan, 2016).

Artikel ini tidak membahas kembali ukuran kebermanfaatan nilai wajar tersebut, tetapi lebih melakukan kajian terhadap tingkat kecenderungan emiten untuk memilih pendekatan nilai wajar dibanding biaya historis untuk penyajian laporan keuangan yang sudah diterapkan di Indonesia sejak 1 Januari 2015. Dasar pemikiran ini adalah harmonisasi akuntansi yang tidak mungkin dihindari. Hal yang terpenting saat ini adalah merumuskan formula dan kesiapan yang terbaik untuk harmonisasi tersebut di Indonesia. PSAK 68 efektif mulai diterapkan di Indonesia pada 1 Januari 2015, tetapi urgensi peran penting profesi penilai di Indonesia belum dapat dilihat di standar ini maupun pada praktek penyusunan laporan keuangan yang berbasis nilai wajar. Hal tersebut didasarkan pada identifikasi tingkatan nilai wajar dalam PSAK 68 yang terbagai pada Level 1, Level 2 dan Level 3. Identifikasi tersebut menjelaskan bahwa penilai professional dapat terlibat pada Level 2 dan 3, sedangkan

penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Level 1 memberikan relevansi yang lebih tinggi dibanding Level yang lain. Dengan demikian, emiten akan lebih cenderung untuk menyajikan instrument keuangannya pada Level 1 dibandingkan yang lain. Kondisi tersebut rawan terjadi salah saji material karena perusahaan yang menilai tanpa menggunakan pedoman tertentu yaitu standar penilaian, nilai wajar yang disajikan dalam laporan keuangan dimungkinkan mengandung *under value* atau bahkan *upper value* (Dechow, Myers dan Shakespeare, 2010). Selanjutnya dijelaskan bahwa peran penilai profesional diperlukan untuk mengakomodir implementasi nilai wajar dan menghindari bias atas laporan keuangan (Dechow, Myers dan Shakespeare, 2010). Dengan demikian, selain menguji tingkat kecenderungan emiten untuk lebih memilih mengungkapkan nilai wajar dibanding biaya historis, artikel ini memberikan informasi ada dan tidaknya pengaruh signifikan atas kualitas audit laporan keuangan dan penerapan PSAK 68 setelah ditetapkannya aturan tersebut terhadap kecenderungan emiten dalam memilih untuk memilih metode nilai wajar atau biaya historis.

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Definisi serta ruang lingkup yang baru tentang nilai wajar diperbaiki di tahun 2013 dengan dikeluarkannya IFRS 13 tentang *fair value measurement*. Definisi baru ini diadopsi pada Standar Akuntansi Indonesia dengan ditetapkannya PSAK 68 pada yang efektif 1 Januari 2015. Sebelum dikeluarkannya standar baru tersebut, teknik pengukuran nilai wajar untuk tujuan laporan keuangan dinilai masih tidak konsisten (Wahyuni, 2013). Oleh karena itu, standar baru ini diharapkan membawa arah pengungkapan laporan keuangan yang berbasis nilai wajar yang lebih baik. Akan tetapi, implementasi nilai wajar ini menjadi tugas yang tidak mudah di Indonesia, karena Indonesia telah menganut konsep *historical cost* selama puluhan tahun bahkan sampai sekarang, misalnya laporan keuangan untuk kepentingan pajak tetap menggunakan *historical cost*. Permasalahan lain tugas yang tidak mudah tentang berlakunya nilai wajar ini adalah kurangnya tenaga profesional bidang penilaian yang menentukan nilai wajar instrumen keuangan pada laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh profesi bidang penilai yang belum lama berkembang di Indonesia. Jika perusahaan menilai tanpa menggunakan pedoman tertentu yaitu standar penilaian, nilai wajar yang disajikan dalam laporan keuangan dimungkinkan mengandung *under value* atau bahkan *upper value* (Dechow, Myers dan Shakespeare, 2010).

Kehandalan nilai wajar dalam penyusunan laporan keuangan masih dibuktikan berbeda-beda di berbagai negara. Selain beberapa hasil penelitian yang disampaikan pada pendahuluan diatas, ada beberapa hasil di Indonesia yang membuktikan relevansi nilai wajar dibanding dengan biaya historis (Maria, 2011; Hidayat, 2012; Juwono dan Feliana, 2013; Widiastuti, 2015; Murti Suyanto, 2017). Akan tetapi, terdapat juga penelitian yang tidak dapat membuktikan relevansi nilai wajar dibanding dengan biaya historis (Petrus dan Farahmita, 2013; Zahro, 2014). Selain di Indonesia beberapa penelitian yang dilakukan di beberapa negara di Asia, Eropa dan Amerika juga menunjukkan hasil yang berbeda. Beberapa penelitian tersebut dapat menunjukkan relevansi penyajian nilai wajar terhadap berbagai ukuran antara lain harga saham, return saham dan nilai perusahaan termasuk penyajian nilai wajar yang dapat menunjukkan performa lebih baik dibandingkan dengan *historical cost* (Danbolt and Rees, 2008; Liao, 2013; Ali, Akbar dan Ormrod, 2016; Laux, 2016; Siekkinen, 2016). Akan tetapi ada juga yang tidak dapat membuktikan kehandalan nilai wajar tersebut dibanding dengan nilai historis bahkan secara ekstrim menyimpulkan bahwa penyajian nilai wajar memiliki potensi informasi yang menyesatkan (Beatrice, 2013; Palea, 2014; Beisland dan Knivsfla, 2015; Majercakova and Skoda, 2015; Šodan, 2015; Bratten, Causholli dan Khan, 2016).

Inkonsistensi hasil penelitian diatas yang memungkinkan menjadi salah satu dasar dewan penyusun Standar Akuntansi Indonesia lebih memilih istilah konvergensi dibanding dengan adopsi. Istilah konvergensi dimulai dari titik awal antara standar nasional akuntansi Indonesia dan IFRS yang berbeda menuju kepada satu standar yang memiliki karakteristik umum yang dimiliki oleh kedua standar (Warsono, 2011: 67). Indonesia mengikuti harmonisasi akuntansi dunia khususnya penerapan nilai wajar dengan harapan bahwa penerapan ini berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja entitas. Hal tersebut ditegaskan dalam kajian ilmiah akuntansi bahwa penerapan *fair value* memudahkan pemahaman atas laporan keuangan di Indonesia yang dikenal secara internasional, meningkatkan arus investasi global melalui transparansi, menurunkan biaya modal dengan membuka peluang *fund raising* melalui pasar modal secara global, menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Suyatmini dan Sheilla, 2014). Dengan demikian implementasi penerapan nilai wajar ini perlu dilakukan kajian secara terus menerus.

Perbaikan terkait tentang teknik pengukuran nilai wajar di Indonesia ditunjukkan dengan ditetapkannya PSAK 68. Standar ini mengatur penilaian menjadi 3 tingkatan (Level). Akan tetapi, terdapat rumusan yang perlu diperhatikan tentang pemberlakuan tingkatan (Level) tersebut. Level 1 adalah level prioritas yang diutamakan emiten untuk menyajikan nilai wajar. Penyajian pada Level 1 ini tidak membutuhkan jasa penilai atau tidak membutuhkan *professional judgment*. Oleh karena itu, terdapat dugaan bahwa sebelum ataupun sesudah ditetapkan PSAK 68, sebagian besar nilai instrumen keuangan disajikan tanpa menggunakan jasa penilai independen. Dugaan ini mendasarkan pada kewajiban pengungkapan pihak penilai independen ataupun internal pada Level 2 maupun Level 3 belum menjadi prioritas dalam PSAK 68. Sementara itu, pengungkapan pada Level 2 dan 3 memerlukan *professional judgment*. Kondisi tersebut menunjukkan peran strategis penilai yang

seharusnya penting dalam konsep nilai wajar, tetapi belum dapat dilihat pada aturan terbaru tentang nilai wajar ini. Peran strategis itu ditegaskan juga bahwa nilai wajar akan menjadi objek manipulasi, jika pengungkapan tidak dilakukan oleh pihak yang profesional (Dechow, Myers and Shakespeare, 2010). Kondisi lain adalah fakta bahwa Indonesia sebagai negara berkembang memiliki volatilitas harga pasar yang tinggi dibanding dengan negara maju (Wahyuni, 2013). Kondisi ini memperberat emiten untuk menyajikan nilai wajar pada Level 1. Pada saat yang sama, KAP memiliki peran dalam melakukan verifikasi atas kewajaran laporan keuangan, termasuk instrumen keuangan yang membutuhkan penilaian. Akan tetapi, Wahyuni (2013) sebagai penasihat teknis IAI menegaskan bahwa materi tentang penilaian adalah kompleks dan rumit. Standard tidak menjelaskan bahwa emiten tidak memiliki kewajiban untuk mengungkap pihak penilai yang melakukan penilaian asset sebesar nilai wajar. Selain itu, verifikasi nilai wajar saat ini dilakukan oleh Akuntan Publik yang menurut Wahyuni (2013) belum memiliki kompetensi khusus bidang penilaian, karena penilaian memiliki pendidikan khusus yang cukup berbeda dengan akuntansi. Dengan demikian dapat dirumuskan dugaan bahwa kecenderungan untuk lebih memilih pengungkapan nilai wajar dibanding nilai historis pada sebelum maupun sesudah ditetapkannya PSAK 68 tidak terdapat perbedaan signifikan. Dugaan tersebut terbukti pada observasi penelitian satu tahun sebelum dan sesudah penerapan PSAK 68 (Murti, 2017). Akan tetapi dua tahun perjalan PSAK 68 yang diadopsi dari IFRS 13 tersebut memungkinkan trend yang baik dengan salah satu indikator kenaikan harga saham gabungan di Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan akhir 2016. Kemungkinan relevansi nilai wajar terhadap sentimen pasar saham tersebut memungkinkan komiten untuk sepenuhnya dapat menerapkan pendekatan nilai wajar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian hipotesis pertama yang dapat dirumuskan adalah:

H1 : Terdapat perbedaan signifikan kecenderungan emiten untuk lebih memilih pengungkapan nilai wajar dibanding biaya historis.

Jika hipotesis 1 tersebut terbukti, maka dugaan lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa PSAK 68 ini signifikan memengaruhi perubahan tingkat kecenderungan emiten untuk lebih memilih pengungkapan nilai wajar dibanding biaya historis pada laporan keuangan. Jika tidak terdapat perubahan signifikan tingkat kecenderungan tersebut, atau hipotesis 1 tidak terbukti, maka PSAK 68 ini diduga tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan tingkat kecenderungan tersebut. Akan tetapi, dengan dasar rumusan yang disampaikan pada hipotesis 1, maka penelitian ini memiliki dugaan bahwa implementasi PSAK 68 memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan emiten untuk lebih memilih penyajian nilai wajar dibanding biaya historis. Hipotesis tersebut dirumuskan sebagai hipotesis 2 sebagai berikut:

H2 : Penetapan PSAK 68 signifikan meningkatkan tingkat kecenderungan emiten untuk lebih memilih menerapkan pendekatan nilai wajar dibanding biaya historis

Kualitas audit atas laporan keuangan yang menggunakan basis nilai wajar ini juga perlu diuji terhadap kecenderungan untuk memilih penyajian nilai wajar. Hal tersebut memperhatikan penjelasan penasihat teknis IAI yang menegaskan bahwa verifikasi nilai wajar dilakukan oleh akuntan publik yang belum memiliki kompetensi khusus bidang penilaian perlu dikaji kembali (Wahyuni, 2013). Penjelasan tersebut dikuatkan dengan temuan penelitian yang membuktikan bahwa kualitas audit yang diukur dengan klasifikasi KAP *big four* memiliki hubungan yang negatif tidak signifikan terhadap kecenderungan untuk lebih memilih penyajian nilai wajar (Murti, 2017). Akan tetapi, fakta kenaikan trend sentimen pasar saham di Indonesia dapat menjadi dasar bahwa ada kemungkinan kualitas auditor memiliki peran terhadap tingkat kecenderungan emiten untuk memilih penyajian nilai wajar. Selain itu, KAP *big four* ditemukan relevan dengan penyajian nilai wajar (Hidayat, 2012). Dengan demikian penelitian ini merumuskan dugaan bahwa kualitas KAP memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan emiten untuk lebih memilih penyajian nilai wajar dibanding biaya *histories*. Artinya, semakin berkualitas KAP, maka emiten akan lebih memilih menggunakan pendekatan nilai wajar dibanding biaya historis dalam laporan keuangan. Hipotesis tiga yang dirumuskan adalah:

H3 : Kualitas KAP berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kecenderungan emiten untuk memilih pengungkapan nilai wajar dibanding biaya historis.

## **METODE PENELITIAN**

Sampel data penelitian yang digunakan adalah 366 laporan keuangan emiten yang terdiri dari 10 sektor selama 4 tahun (2013 sampai dengan 2016) dengan emiten yang sama pada setiap tahunnya. Durasi empat tahun tersebut berdasar pertimbangan tujuan penelitian ini yaitu mencari tahu tingkat kecenderungan untuk memilih penyajian nilai wajar pada masa dua tahun sebelum dan sesudah penetapan PSAK 68 pada 1 Januari 2015. Dengan demikian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel.

Tingkat kecenderungan emiten untuk lebih memilih penyajian nilai wajar dibanding dengan biaya historis tersebut diukur dari selisih absolut penyajian laba rugi kompresif berdasarkan laba nilai wajar (LNW) dibanding

laba berdasar biaya historis (LCH). Selisih antara LNW dengan LCH yang semakin kecil mengindikasikan bahwa tingkat kecenderungan emiten untuk lebih memilih penyajian nilai wajar dibanding dengan biaya historis adalah semakin kecil yaitu dalam rangka membuat pos penyesuaian tentang penilaian kembali atas laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan tersebut memberikan indikasi bahwa emiten lebih banyak menyajikan instrumen keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasinya. Kondisi sebaliknya adalah perhitungan LNW memiliki selisih yang cukup besar terhadap LCH, maka emiten lebih banyak membuat pos penyesuaian penilaian kembali instrumen keuangan atau kecenderungan mengungkapkan nilai wajar emiten diindikasikan semakin besar. Definisi dan untuk pengukuran untuk menghitung besar LCH dan LNW diadopsi dari Widiastuti (2015) yang ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Formula Menghitung Laba Cost Historis (LCH)**

Laba Tahun Berjalan (Laba Nilai Wajar)	Ditambah penurunan nilai piutang, penurunan nilai persediaan, penurunan nilai aset tetap tidak berwujud, termasuk goodwill
	Ditambah atau dikurangi rugi penurunan nilai atau pembalikan / pemulihan rugi penurunan nilai aset keuangan
	Ditambah atau dikurangi rugi atau untung yang belum erealisasi untuk aset dan liabilitas keuangan yang termasuk dalam kelompok diperdagangkan
	Ditambah atau dikurangi rugi penurunan nilai aset tidak lancar yang diklasifikasikan untuk dijual dan operasi dihentikan termasuk penurunan nilai properti investasi
	Ditambah atau dikurangi rugi atau laba selisih mata uang asing

Penerapan PSAK 68 diukur dengan variabel *dummy*. Observasi yang dilakukan pada sampel penelitian pada tahun 2013 dan 2014 atau masa sebelum penerapan PSAK 68 dinilai dengan nol (0). Sementara itu, masa observasi atas sampel penelitian tahun 2015 dan 2016 dinilai dengan satu (1) yaitu masa observasi setelah penerapan PSAK 68 pada 1 Januari 2015. Kualitas KAP diukur dengan kualifikasi KAP *big four* dan *non-big four*. Ukuran ini pernah digunakan oleh beberapa peneliti lain yaitu (Hidayat, 2012; Zahro, 2014; Damayanti dan Susanto, 2015). Kelayakan *proxy* kualitas KAP ini dipertegas juga pada penelitian Hidayat (2012) bahwa KAP *Big four* dianggap oleh investor mampu menjaga keandalan nilai wajar meskipun mengandung asumsi dari appraisal, karena auditor juga harus melakukan telaah atas penilaian dari penilai. Identifikasi KAP *big four* di Indonesia yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pada data Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Kementerian Keuangan tahun 2015. KAP yang tergolong dalam *big four* adalah Price Water House Cooper (PWC), Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young (E & Y). KAP yang termasuk dalam *big four* mempunyai ukuran 1, sedangkan yang tidak termasuk *big four* diberikan ukuran 0.

Analisis ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama untuk mengetahui perbedaan tingkat kecenderungan emiten untuk lebih memilih pengungkapan nilai wajar dibanding dengan biaya historis antara masa sebelum dibanding sesudah penerapan PSAK 68. Tahap pertama tersebut untuk menguji hipotesis 1 menggunakan *paired t-test*. Tahap kedua adalah mengetahui faktor yang memengaruhi akurasi pengungkapan nilai wajar tersebut pada masa observasi penelitian. Data yang digunakan adalah empat tahun observasi dengan jenis data panel. Analisis faktor yang memengaruhi akurasi ini menggunakan regresi berganda yang diadopsi dari (Widarjono, 2013: 253). Langkah yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis 2 dan 3 dapat dirumuskan formula yang ditunjukkan pada Persamaan 1, dengan tahap sebagai berikut: (1) Uji spesifikasi ketepatan model estimasi regresi analisis data panel apakah *Fixed Effect*, *Random effect* atau *Common Effect*. (2) Uji asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, multikolinieritas, dan heterokedastisitas. (3) Uji pengaruh masing-masing variabel X terhadap Y secara parsial dengan indikator *P-Value*.

$$Lnw\_Lchit = \alpha_0 + \alpha_1 KAPit + \alpha_2 D68it + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- Lnw\_Lchit = Tingkat kecenderungan emiten (i) untuk lebih memilih pendekatan nilai wajar dibanding biaya historis  
 KAPit = Kualitas KAP pada Emiten i, tahun t  
 D68 = Masa observasi penelitian sebelum dan sesudah penerapan PSAK 68

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Obyek penelitian ini adalah laporan keuangan seluruh emiten yang dipublikasi melalui BEI dengan anggota populasi sebanyak 537 laporan keuangan selama 4 tahun (atau sebanyak 2.148 observasi dengan durasi tahun 2013 sampai dengan 2016). Pertimbangan pemilihan tahun tersebut telah dijelaskan pada pendahuluan bahwa batas tahun tersebut sebagai tujuan penelitian melihat efek sebelum dan sesudah penetapan PSAK 68 pada 1 Januari 2015. Berdasar kriteria sampling dengan argumen pertimbangan yang disampaikan pada metode

Kecenderungan Emiten untuk Memilih Menyajikan Laporan Keuangan berdasarkan Nilai Wajar Setelah Penerapan PSAK 68 (Nugroho Wisnu Murti dan Arief Budhi Darma)

penelitian diatas, maka sampel penelitian ini berjumlah 366 laporan keuangan emiten pertahun (1.464 observasi). Jumlah observasi tersebut termasuk telah dikeluarkannya obyek observasi karena delisting dan untuk mencapai data observasi dalam jumlah dan sampel yang sama setiap tahun penelitian. Ringkasan statistic deskriptif data tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

Tahun	Kualitas KAP	Mean Abs Lnw_Lbh	St_Dev Abs_Lnw_Lbh	Lnw > Lbh	Lnw < Lch	Lnw = Lbh
2013	126 (34,4%)	190.099.928	1.724.299	164	166	36
2014	130 (35,5%)	94.719.816	1.406.179	121	240	5
2015	136 (37,7%)	169.765.089	2.179.593	186	179	1
2016	128 (35,0%)	267.615.241	2.713.292	165	191	10

Sumber: 1.464 Laporan keuangan emiten yang dipublikasi di BEI, 366 observasi setiap tahun

**Keterangan:**

- Kualitas KAP : Jumlah dan prosentase emiten dari sampel penelitian yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP *big four*
- Mean Abs Lnw\_Lbh : Rata-rata tingkat kecenderungan emiten untuk mengungkapkan nilai wajar yang dihitung dari formula yang ada di Tabel 1
- St\_Dev Abs Lnw\_Lbh : Standar Deviasi tingkat tingkat kecenderungan emiten untuk mengungkapkan nilai wajar yang dihitung dari formula yang ada di Tabel 1
- Lnw > Lbh : Jumlah emiten yang menyajikan nilai wajar laporan keuangannya lebih besar dibandingkan dengan biaya historis
- Lnw < Lch : Jumlah emiten yang menyajikan nilai wajar laporan keuangan lebih kecil dibandingkan dengan biaya historis
- Lnw = Lbh : Jumlah emiten yang menyajikan nilai wajar laporan keuangan sama dengan biaya historis

Berdasar Tabel 2, dapat ditunjukkan bahwa jumlah observasi tiap tahun penelitian adalah sama (366 anggota sampel). Tabel kualitas KAP menunjukkan jumlah KAP yang diaudit oleh KAP *big-four*. Prosentase yang ditunjukkan pada kolom kualitas audit pada Tabel 2 menunjukkan prosentase jumlah emiten yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP *big-four*. Data tersebut menunjukkan bahwa emiten di Indonesia memberikan tugas audit kepada KAP termasuk dalam daftar big four rata-rata 35,5% selama tahun 2013 sampai dengan 2016. Artinya lebih dari 50% emiten di Indonesia mempercayakan pekerjaan ausit atas laporan keuangannya kepada KAP yang tidak termasuk dalam daftar *big four*. Selama periode observasi tersebut jumlah emiten yang melakukan audit kepada KAP *big four* memiliki trent kenaikan rata-rata sebesar 0,6% selama tahun 2013 sampai dengan 2016. Penurunan jumlah emiten yang melakukan audit pada KAP *big-four* adalah pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015, tetapi tahun 2015 menunjukkan jumlah yang terbanyak. Jumlah terbanyak pada tahun tersebut dimungkinkan karena penerapan resmi PSAK 68 diadopsi dari IFRS 13 yang resmi diterapkan pada 1 Januari 2015.

Analaisis yang dilakukan untuk membuktikan hipotesis 1 menunjukan hasil nilai  $Pr(|T| > |t|) = 0,0229$  atau  $< 0,05$ . Dengan demikian penelitian ini dapat membuktikan hipotesis 1 bahwa terdapat perbedaan signifikan kecenderungan emiten untuk lebih memilih penyajian nilai wajar laporan kauangan pada masa dua tahun sebelum dibanding sesudah penerapan secara resmi PSAK 68 pada 1 Januari 2015. Hasil ini berbeda dengan temuan sebelumnya yang melakukan analisis pada masa satu tahun sebelum dan sesudah penerapan standar yang mengatur nilai wajar tersebut. Murti (2017) menemukan bahwa tidak ada beda signifikan atas tingkat kecenderungan emiten untuk lebih memilih menyajikan laporan keuangan dalam nilai wajar pada masa satu tahun sebelum dibanding sesudah penerapan PSAK 68 (2014 dan 2015). Dengan demikian, terdapat kemungkinan bahwa emiten memiliki kesiapan yang lebih mulai pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Kemungkinan tersebut diperkuat dengan hasil statistic deskriptif pada Tabel 2 yang menunjukkan peningkatan selisih LNW dengan LCH yang semakin besar di tahun 2016 dibanding 2015.

Untuk memberikan penguatan bahwa perubahan signifikan penyajian nilai wajar tersebut dipengaruhi oleh penerapan PSAK 68, maka diperlukan analysis atas rumusan Hipotesis 2 bahwa Penerapan PSAK 68 berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan emiten untuk lebih memilih malakukan penyajian nilai wajar pada laporan keuangan. Hipotesis 2 dan 3 dianalisis dengan menggunakan *robustness panel data regression*. Hasil analisis *Hausman test* yang dilakukan menunjukkan bahwa persamaan regresi tersebut paling

layak menggunakan *fixed effect* (FE). Hasil *multicollinearity test* atas persamaan *fixed effect* tersebut juga menunjukkan bahwa persamaan ini terbebas dari masalah *multicollinearity* (VIF 1,22;  $1/VIF = 0,821028$ ). Ringkasan hasil analisis *robustness panel data regression, fixed effect* tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Ringkasan *Robustness Panel Data Regression, Fixed Effect***

Variabel	Observasi	Coeffisien	P-Value
Constanta	1464	332639,8	0.000
KAPit	1464	161435,1	0.183
D68	1.64	207533,9	0.020
P- Value Uji F	= 0.0208		

Sumber: Olah data atas 1.464 Laporan keuangan emiten yang dipublikasi di **BEI**

Berdasar Tabel 3, maka dapat ditunjukkan bahwa Hipotesis 2 terbukti bahwa penerapan PSAK 68 berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan emiten untuk memilih melakukan penyajian nilai wajar pada laporan keuangannya (P-Value = 0,020). Hasil ini memberikan penegasan bahwa perbedaan tingkat kecenderungan emiten untuk lebih memilih pendekatan nilai wajar dibanding dengan biaya historis adalah berbeda signifikan antara 2 tahun sebelum dengan 2 tahun sesudah penerapan efektif PSAK 68 pada 1 Januari 2015, terbukti aturan tersebut juga berpengaruh positif signifikan. Hasil ini tidak sama dengan temuan sebelumnya bahwa PSAK 68 negatif signifikan terhadap tingkat kecenderungan emiten untuk memilih nilai wajar (Murti, 2017). Perbedaan hasil penelitian tersebut memberikan indikasi bahwa implementasi standar akuntansi nilai wajar oleh emiten akan mulai efektif setelah berjalan minimal 1 tahun setelah efektif diterapkan.

Kualitas audit yang diukur dari identifikasi KAP *big four* dan *non-big four* tidak terbukti signifikan mempengaruhi tingkat kecenderungan emiten untuk memilih penyajian nilai wajar dibanding biaya historis (P-Value = 0,183). Temuan ini sama dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa kualitas KAP tidak signifikan terhadap tingkat kecenderungan emiten untuk memilih penyajian nilai wajar dibanding biaya historis (Murti, 2017). Kualitas KAP yang diukur dengan indikator yang sama ini juga tidak ditemukan signifikan dalam mempengaruhi nilai perusahaan (Murti dan Suyanto, 2017). Akan tetapi penelitian ini menemukan hubungan positif antara kualitas KAP dengan akurasi penyajian nilai wajar, dan hasil tersebut berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa kualitas KAP memiliki hubungan negatif dengan tingkat kecenderungan emiten untuk lebih memilih penyajian nilai wajar dibanding dengan biaya historis (Murti dan Suyanto, 2017). Hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa KAP memberikan peranan yang positif pada kesiapan emiten yang lebih baik di tahun 2015 dibanding dengan 2016 atas penyajian nilai wajar. Indikasi tersebut diperkuat dengan Tabel 3 yang menunjukkan trend peningkatan kualitas audit bahwa jumlah emiten yang meminta jasa audit kepada KAP *big four* semakin meningkat dari tahun 2013 sampai 2016. Trend peningkatan tersebut juga diikuti dengan trend kenaikan tingkat kecenderungan emiten untuk lebih memilih penyajian nilai wajar dibanding biaya historis.

## PENUTUP

Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan signifikan atas tingkat kecenderungan emiten untuk menyajikan laporan keuangan dengan pendekatan nilai wajar pada dua tahun sebelum penerapan PSAK 68 (2013-2014) dibanding dengan 2 tahun setelah penerapan nilai wajar (2015-2016). Perbedaan yang signifikan tersebut tidak ditemukan pada masa satu tahun sebelum penerapan PSAK 68 (2014) dibanding satu tahun setelahnya (2015). Informasi kedua yang dapat menjadi berita baik bagi Ikatan Akuntan Indonesia bahwa penetapan PSAK 68 ini meningkatkan secara signifikan kecenderungan emiten untuk memilih menyajikan laporan keuangannya berdasar nilai wajar dibanding dengan biaya historis. Akan tetapi, hasil yang juga penting diperhatikan adalah perbandingan penyajian laba/rugi berdasarkan laba nilai wajar dan cost historis yang diungkapkan oleh emiten. Laba berdasarkan perhitungan nilai wajar disajikan lebih besar dibandingkan cost historis ( $L_{nw} > L_{ch}$ ) hanya terjadi di tahun 2015 (50,8%). Artinya, hanya pada tahun tersebut lebih dari 50 persen emiten di Indonesia menyajikan laba nilai wajar yang lebih besar dari nilai *cost histories*. Hasil tersebut memberikan indikasi bahwa performa laporan laba rugi yang dihitung dengan nilai wajar lebih baik dengan *cost histories* hanya lebih banyak terjadi di tahun 2015 saja. Hasil ini dapat mengindikasikan bahwa penerapan nilai wajar sesungguhnya memberikan penekanan terhadap beberapa instrument keuangan yang perlu diukur *under value* dibandingkan dengan perhitungan berdasarkan biaya historis selain pada tahun 2015.

Kualitas KAP pada penelitian ini tidak terbukti signifikan mempengaruhi kecenderungan emiten untuk memilih menyajikan laporan keuangan berdasar nilai wajar dibanding biaya historis. Akan tetapi kualitas KAP yang diukur dengan kategori KAP *big four* dan *non-big four* memberikan peran positif dalam peningkatan tingkat kecenderungan emiten untuk lebih memilih menyajikan nilai wajar dibandingkan biaya historis. Hasil ini merupakan informasi penting bagi emiten bahwa KAP yang memiliki afiliasi KAP international dan termasuk dalam daftar *big-four* memberikan indikasi memiliki pengalaman yang lebih baik dalam melakukan verifikasi nilai wajar. Hasil ini tidak dapat menyimpulkan bahwa KAP *non-big four* tidak memiliki kualitas audit yang baik

dalam melakukan verifikasi nilai wajar, karena penelitian ini memiliki batasan pengukuran kualitas audit pada ukuran KAP. Akan tetapi, hasil penelitian ini informasi penting dapat disampaikan bahwa kualitas KAP khususnya dalam melakukan verifikasi nilai wajar akan tentu memiliki peran positif pada penyajian nilai wajar oleh emiten. Disisi yang sama, emiten juga sebaiknya memiliki tenaga profesional yang membidangi penilaian asset atau memberikan penugasan kepada pihak independen yang membidangi penilaian asset dengan ruang lingkup penugasan penilaian untuk tujuan penyusunan laporan keuangan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Ali, A., Akbar, S. and Ormrod, P. (2016) 'Impact of international financial reporting standards on the profit and equity of AIM listed companies in the UK', *Accounting Forum*. Elsevier Ltd, 40(1), pp. 45–62. doi: 10.1016/j.accfor.2015.12.001.
- Beatrice, V. A. (2013) 'Fair Value Measurement in Agriculture and the Potential To Mislead', *Academica Brancusi, University Of Trgu Jiu*, (5), pp. 95–98.
- Beisland, L. A. and Knivsflo, K. H. (2015) 'Have IFRS changed how stock prices are associated with earnings and book values? Evidence from Norway', *Review of Accounting and Finance*, 14(1), pp. 41–63. doi: <http://dx.doi.org/10.1108/MRR-09-2015-0216>.
- Bratten, B., Causholli, M. and Khan, U. (2016) 'Usefulness of fair values for predicting banks??? future earnings: evidence from other comprehensive income and its components', *Review of Accounting Studies*. Springer US, 21(1), pp. 280–315. doi: 10.1007/s11142-015-9346-7.
- Damayanti, F. and Susanto, T. (2015) 'Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Asset Terhadap Tax Avoidance', *ESENSI Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2), pp. 187–206.
- Danbolt, J. and Rees, W. (2008) 'An experiment in fair value accounting : UK investment vehicles', *European Accounting Review*, 17(July), pp. 271–303.
- Dechow, P. M., Myers, L. A. and Shakespeare, C. (2010) 'Fair value accounting and gains from asset securitizations: A convenient earnings management tool with compensation side-benefits', *Journal of Accounting and Economics*. Elsevier, 49(1–2), pp. 2–25.
- Hidayat, T. (2012) 'Pengaruh Ukuran Kap Dan Auditor Tenure Terhadap Value Relevance Dari Nilai Wajar', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Universitas Indonesia*, 9(2), pp. 171–188.
- Juwono, T. C. and Feliana, Y. K. (2013) 'Relevansi Informasi Nilai Wajar Aset Tetap dan Properti Investasi (Studi Empiris pada Badan Usaha yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2013)', in *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper : Peluang Indonesia dalam Persaingan Ekonomi Kreatif Global*. Surabaya, Indonesia: Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, pp. 1–2.
- Laux, C. (2016) 'The economic consequences of extending the use of fair value accounting in regulatory capital calculations : A discussion', *Journal of Accounting and Economics*. Elsevier, 62(2–3), pp. 204–208. doi: 10.1016/j.jacceco.2016.10.005.
- Liao, Y. (2013) 'Managerial Finance The impact of fairvalueaccounting on the relevance of capital adequacy ratios Evidence from Taiwan', *Managerial Finance Iss Journal of Financial Reporting and Accounting Iss Journal of Financial Regulation and Compliance*, 39(3), p. 133154.
- Majercakova, D. and Skoda, M. (2015) 'Fair value in financial statements after financial crisis', *Journal of Applied Accounting Research*, 16(3), pp. 312–332. doi: 10.1108/JAAR-07-2014-0069.
- Maria, S. (2011) *Analisis Perbandingan Model Fair Value dan Model Historical Cost Serta Penerapannya Terhadap Aset Tetap (Studi kasus pada PT Sidomulyo Selaras Tbk)*. Jakarta, Indonesia.
- Murti, N. W. (2017) *Value Relevance Atas Penerapan Konsep Nilai Wajar dibanding Biaya Historis di Indonesia (Event Study: Masa Sebelum dan Sesudah Penerapan Standar Tentang Pengukuran Nilai Wajar Untuk Menyusun Laporan Keuangan)*. Universitas Gadjah Mada.
- Murti, N. W. and Suyanto (2017) 'The Relevance of Fair Value Concept Compared to Historical Costs in Indonesia', in *Indonesia Focus*, pp. 1–6.
- Palea, V. (2014) 'Fair value accounting and its usefulness to financial statement users', *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 12(2), pp. 102–116.
- Petrus, E. P. and Farahmita, A. (2013) *Analisa Pengaruh Pendekatan Pengukuran Nilai Wajar dan Nilai Historis Terhadap Value Relevance Asset Biologis (Studi Empiris Pada Perusahaan Perkebunan di Indonesia, Malaysia dan Singapura)*. Jakarta, Indonesia.
- Siekkinen, J. (2016) 'Value relevance of fair values in different investor protection environments', *Accounting Forum*. Elsevier Ltd, 40(1), pp. 1–15. doi: 10.1016/j.accfor.2015.11.001.
- Šodan, S. (2015) 'The impact of fair value accounting on earnings quality in eastern European countries', *Procedia Economics and Finance*. Elsevier B.V., 32(15), pp. 1769–1786. doi: 10.1016/S2212-5671(15)01481-1.
- Wahyuni, E. T. (2013) 'Sukar Menakar Nilai Wajar : Tinjauan atas IFRS 13 Fair Value Measurement', *Majalah Akuntan Indoneisa*. Available at: <http://etw-accountant.com/sukar-menakar-nilai-wajar-tinjauan-atas->



- ifrs-13-fair-value-measurement/#more-225 diakses tanggal 7 Februari 2017.
- Warsono, S. (2011) *Adopsi Standar Akuntansi IFRS (Fakta, Dilema dan Matematika)*. Edited by I. Natalia. Yogyakarta, Indonesia: AB PUBLISHER.
- Widiastuti, H. (2015) *Relevansi-Nilai Laba Kos Historis Dan Laba Nilai Wajar Untuk Keputusan Investasi, Kredit, Dan Kompensasi Manajemen: Pengujian Kebermanfaatan Valuasi Dan Stewardship, Desertasi Doktor Bidang Akuntansi Universitas Gadjah Mada*. Universitas Gadjah Mada.
- Zahro, M. (2014) 'Akuntansi Nilai Wajar, Voalitas Laba, dan Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan', *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, STESIA*, 3(11), pp. 1–25.